

Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Budaya Di Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon

Gian Anggraeni Andriyanto

anggrainigian@gmail.com

Universitas Swadaya Gunung Jati

Jl. Pemuda Raya No.32, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132

Info Artikel

| **Submitted:** 17 Mei 2024 | **Revised:** 4 Juli 2024 | **Accepted:** 9 Juli 2024

How to cite: Gian Anggraeni Andriyanto, dkk, “*Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Budaya Di Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon*”, *BELEID: Journal Of Administrative Law And Public Policy*, Vol. 2, No. 2, November, 2024”, hlm. 138-154.

ABSTRACT

Sitiwinangun Tourism Village in Cirebon Regency is famous as a world-class pottery producer and the oldest in West Java, facing serious challenges with the reduction in the number of pottery craftsmen from 1000 craftsmen remaining 100 craftsmen, resulting in a decline in the existence of pottery. The collaborative governance approach in the development of culture-based tourism villages has a crucial role in creating tourism sustainability in Sitiwinangun Village. This research examines collaborative governance strategies, inhibiting factors, and the roles and efforts of actors in the development of Sitiwinangun Tourism Village. The research used a naturalistic qualitative method through analysis of the collaborative governance model from Ansell and Gash. The results showed that the collaborative governance approach in the development of tourist villages in Sitiwinangun Village has not run optimally. This is obtained from Ansell and Gash's collaborative governance indicators that have not been fully achieved, namely: There are no official rules that bind stakeholders to collaborate, transparency and imbalance of resources, lack of trust between stakeholders and leadership. Factors inhibiting the collaboration process and tourism development are limited human resources, lack of pottery training and marketing, lack of training and community understanding. However, the village government, stakeholders and the community have played a role and strived for the sustainable development of Sitiwinangun Tourism Village.

Keyword: *Collaborative Governance, Village Tourism Development, Sitiwinangun Tourism Village*

ABSTRAK

Desa Wisata Sitiwinangun di Kabupaten Cirebon terkenal sebagai penghasil gerabah kelas dunia dan tertua di Jawa Barat, menghadapi tantangan serius dengan berkurangnya jumlah pengrajin gerabah dari 1000 pengrajin tersisa 100 pengrajin sehingga berdampak menurunnya eksistensi gerabah. Pendekatan *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata berbasis budaya memiliki peran krusial dalam menciptakan keberlanjutan pariwisata di Desa Sitiwinangun. Penelitian ini mengkaji strategi *collaborative governance*, faktor penghambat, serta peran dan upaya aktor dalam pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun. Penelitian menggunakan metode kualitatif naturalistic melalui analisis model *collaborative governance* dari Ansell dan Gash. Hasil penelitian menunjukkan pendekatan *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata di Desa Sitiwinangun belum berjalan optimal. Hal ini didapatkan dari indikator *collaborative governance* Ansell dan Gash yang belum seluruhnya tercapai, yaitu: belum ada aturan resmi yang mengikat para stakeholder untuk berkolaborasi, transparansi dan ketidakseimbangan sumber daya, kurangnya kepercayaan antar stakeholder serta kepemimpinan. Faktor penghambat proses kolaborasi dan pengembangan wisata yaitu SDM yang terbatas, kurangnya pelatihan dan pemasaran gerabah, kurangnya pelatihan dan pemahaman masyarakat. Namun demikian, pemerintah desa,

stakeholder dan masyarakat telah berperan dan mengupayakan pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun yang berkelanjutan.

Kata Kunci: : *Collaborative Governance, Pengembangan Desa Wisata , Desa Wisata Sitiwinangun.*

Pendahuluan

Indeks Daya Saing Pariwisata Indonesia menunjukkan kinerja pariwisata Indonesia berdasarkan *World Economic Forum* (WEF) 2017 menduduki peringkat ke-42 dengan skor 4,16. Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pariwisata kini tengah menggarap bidang pariwisata salah satunya adalah desa wisata. Desa wisata adalah desa yang memiliki budaya yang masyarakatnya diprioritaskan dan dieksplorasi¹. Melalui kemenarikan wisata alam, budaya, dan fasilitas lainnya, pengembangan wisata desa atau desa wisata membuat desa sebagai pusat wisata². Pengembangan sesuai dengan prinsip utama desa wisata yaitu mengembangkan desa kerajinan. Desa wisata memperlihatkan adanya potensi yang diunggulkan dan Desa wisata adalah tempat di mana daya tarik, fasilitas, dan aksesibilitas digabungkan dengan tradisi³. Prinsip ini menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif sesuai potensi dan sumber daya lokal. Beberapa daerah di Indonesia juga telah mengembangkan wisata desa. Wisata budaya salah satunya terletak di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

Pada tahun 2022, berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, terdapat 22 desa di Kabupaten Cirebon yang ditetapkan sebagai desa wisata. Dasar hukum pengelolaan dan pengembangan desa wisata di Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1. Perpres 57 Tahun 2022 tentang pelatihan dan pembangunan desa Pariwisata di Bupati Cirebon. Pengelolaan dan pengembangan desa wisata tidak hanya terfokus menarik wisatawan namun juga dapat menjadikan desa wisata menjadi kawasan wisata berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan suatu kawasan wisata tidak lepas dari pengembangan dan penggalian potensi wisata itu sendiri, mulai dari tingkat daerah atau yang paling rendah⁴.

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai manfaat terhadap masyarakat setempat dan sekitarnya. Pariwisata berkelanjutan merupakan upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara

¹ Andi Risfan Rizaldi and Parea Rusan Rangan, "Desa Wisata," 2021, <https://www.researchgate.net/publication/358739614>, hal-18.

² Aries Kurniawan, and Moh Dian Kurniawan. "Pengembangan, Strategi, Wisata Desa, Yang Berkelanjutan Sukaris.. "Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License," n.d. <https://doi.org/10.30587/manajerial.v10i1.4751>. 2023. hal-13.

³ Maya Sajidah Salsabila et al., "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri) Affiliation 1," *Jurnal Pariwisata Terapan*, vol. 5, 2021, <https://jurnal.ugm.ac.id/jphttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcod>.hal-39

⁴ Neneng Komariah, Encang Saepudin, and Pawit M. Yusup, "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal," *Jurnal Pariwisata Pesona* 3, no. 2 (December 26, 2018), <https://doi.org/10.26905/jpp.v3i2.2340>. hal-10.

mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumberdaya alam dan budaya secara berkelanjutan⁵.

Dengan mengidentifikasi keterlibatan berbagai pihak dan pembangunan kawasan wisata, kolaborasi sumber daya dan kolaborasi yang dimulai oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa⁶. Hal ini hanya dapat dicapai dengan sistem tata kelola yang baik (*good governance*) dengan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam rangka mengembangkan pariwisata berkelanjutan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengembangkan 4 pilar. meliputi (1) pengelolaan berkelanjutan (bisnis pariwisata), (2) ekonomi berkelanjutan (sosial ekonomi) jangka panjang, (3) keberlanjutan budaya (*sustainable culture*) harus selalu dikembangkan dan dipelihara, dan (4) aspek lingkungan hidup (ketahanan lingkungan). Desa wisata merupakan perwujudan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Desa wisata salah satu bentuk pembentukan dan pengembangan desa wisata di Jawa Barat Kabupaten Cirebon.

Desa Sitiwinangun menjadi salah satu desa wisata budaya di Kabupaten Cirebon. Desa Wisata Sitiwinangun memiliki pengrajin gerabah yang sempat mencapai 1000 orang pengrajin. Namun, dari tahun ke tahun jumlah pengrajin terus berkurang, hingga pada sekitar tahun 1990-an jumlah pengrajin menurun secara drastis dan hanya tersisa sekitar 30 orang pengrajin pada tahun 2016 (Kompas.com, 2018). Berdasarkan data dari Warisan Budaya Takbenda Indonesia pada tahun 2018 Desa Wisata Sitiwinangun diresmikan menjadi Desa Wisata berbasis budaya oleh Sultan Keraton Kasepuhan Cirebon, PRA Arief Natadiningrat, pada tanggal 22 November 2018. Setelah diresmikan menjadi Desa Wisata, oleh Pangeran Arif, jumlah pengrajin semakin bertambah hingga terdapat 73 orang pengrajin gerabah sekarang (Warisan Budaya Kemdikbud, 2018). Kerajinan gerabah sebagai kearifan local dari budaya asli dari Desa Sitiwinangun. Kearifan lokal adalah sekumpulan pengetahuan dan kebiasaan yang berasal dari generasi-generasi sebelumnya dan pengalaman yang terkait dengan lingkungan dan masyarakat lainnya yang dimiliki oleh suatu komunitas di suatu tempat. Kearifan lokal dapat digunakan untuk menyelesaikan secara efektif berbagai masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut⁷.

⁵ Sri Rahayu, "Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan," 2022, <https://www.researchgate.net/publication/370060422.hal-1>.

⁶ Made Heny Urmila Dewi, "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali," *Jurnal Kawistara* 3, no. 2 (August 17, 2013), <https://doi.org/10.22146/kawistara.3976.hal-2>.

⁷ Komariah, Saepudin, and Yusup, "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal." 2018. hal-9.

Desa wisata Sitiwinangun tidak bisa berkembang sendiri untuk mewujudkan desa wisata yang berkelanjutan. Tentu saja pengembangan desa wisata Sitiwinangun tidak bisa dicapai hanya dengan satu pihak dari otoritas desa Sitiwinangun. Namun hal ini memerlukan partisipasi yang terkoordinasi antara pemerintah desa setempat, pemerintah kabupaten, pengelola, masyarakat Desa Wisata Sitiwinangun, dan pihak swasta. Sinergi pariwisata penting untuk mengembangkan potensi wisata suatu destinasi dan diperlukan model sinergi untuk memandu pemangku kepentingan pariwisata dalam pengembangan destinasi⁸.

Prinsip pengelolaan kolaboratif pengembangan pariwisata diperlukan untuk mendukung pariwisata berkelanjutan namun tetap layak dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya keterlibatan berbagai pihak dalam pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun. Hal ini sangat penting karena mempunyai daya tarik tersendiri untuk mendorong pembangunan desa dengan menggandeng sumber daya dari berbagai pihak. Salah satu konsep yang dapat mendukung pengembangan desa wisata dengan berkolaborasi dengan berbagai aktor adalah konsep *collaborative governance*, yaitu konsep yang melibatkan banyak pihak baik pemerintah, non-pemerintah maupun pemangku kepentingan dan masyarakat atau komunitas yang mempunyai kepentingan masing-masing untuk dilindungi mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, dalam *collaborative governance* terdapat tiga pilar atau pelaku dalam *governance*, yaitu swasta, pemerintah, dan penerima layanan atau masyarakat⁹.

Pengelolaan pariwisata meliputi perencanaan; pengelolaan; memantau; dan evaluasi tidak akan efektif jika hanya diberikan prioritas *top-down*, apalagi parsial. Sesuai pernyataan Menteri Pariwisata Arief Yahya¹⁰, bahwa sinergitas unsur-unsur dalam pentagram diperlukan sebagai kunci keberhasilan tata kelola pariwisata. Diperlukan kolaborasi yang berkualitas antara peserta pariwisata dan pemangku kepentingan (organisasi pengelola destinasi) termasuk kontribusi rantai berujung lima yang umumnya dikenal sebagai ABCGM, yaitu Akademisi (*Academician*), Bisnis (*Business*), Komunitas (*Community*), Pemerintah (*Government*), dan Media

⁸ Mahardhika Berliandaldo, Achmad Chodiq, and Driszal Fryantoni, "Kolaborasi Dan Sinergitas Antar Stakeholder Dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong," *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia* 4, no. 2 (2021): 221-34, <https://doi.org/10.31842/jurnalinoibis.v4i2.179>. hal-3.

⁹ Shofiyatin, Elis. "Collaborative_Governance_Sebuah_Penganta (1)," Doc Num: 007/AdmPublik-ES/Gen-X11-2022 n.d.hal-3.

¹⁰ Matthoriq Matthoriq, Soesilo Zauhar, and Romy Hermawan, "Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Pariwisata-Desa (Studi Pariwisata-Desa 'Bumiaji Agrotourism' Di Kota Wisata Batu)," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 007, no. 01 (2021): hal 20-29, <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2021.007.01.3>.

(Media) sebagai pengembangan operasionalisasi dari pilar pembangunan era *governance*.

Hal ini selaras dengan paradigma kepemimpinan dalam ilmu administrasi negara, yang menyatakan bahwa mendorong peran pemerintah kepada kelompok lain, yang juga merupakan komponen penting dalam pembangunan, membantu membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)¹¹. Mengingat betapa pentingnya peran pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan, pembangunan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah; stakeholder lain juga aktif berpartisipasi dalam proses tersebut. Berdasarkan uraian permasalahan di atas dan penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang *collaborative governance* dengan judul penelitian "*Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Budaya Di Desa Wisata Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon*".

Metode Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan kualitatif naturalistik yang dilakukan pada objek alami, yang berkembang secara natural tanpa dimanipulasi oleh peneliti, dan dinamika objek tersebut tidak boleh dipengaruhi oleh kehadiran peneliti. Penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dari sudut pandangnya, yang mencakup aspek konsep, perilaku, persepsi, dan masalah manusia. Oleh karena itu, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena, kondisi, peristiwa, dan situasi sosial yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami perilaku, persepsi, dan motivasi subjek secara menyeluruh dalam lingkungan sosial yang alami, dengan memanfaatkan tipe dan cara¹².

Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena untuk mendeskripsikan dan menganalisis tahap implementasi atau pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun yang berbasis budaya yang tidak menyangkut jumlah (kuantitas) melainkan kata-kata atau gambar yang digali secara mendalam. Untuk jenis data penelitian yang digunakan yaitu data kualitatif, untuk menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur.

Sedangkan sumber data penelitian penulis dapatkan dari data primer dan data sekunder. Data primer penulis dapatkan langsung dari narasumber melalui wawancara dan observasi di Desa Sitiwinangun berupa informasi ataupun fakta sedangkan data sekunder penulis peroleh dari perpustakaan, penelitian terdahulu

¹¹ Rochmatin, Laily., "*Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan Di Desa Wisata Kertosari*," n.d. 2022. hal-8.

¹² Rifka Agustianti et al., *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Tohar Media*, n.d., <https://toharmedia.co.id>. 2022. hal 12-13.

dan buku. Model analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari hasil wawancara dengan para pihak.

Hasil dan pembahasan

Dalam pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun, keberadaan dan keterlibatan para pihak baik pemerintah, swasta ataupun lembaga non-pemerintah berperan penting, walaupun masyarakat desa yang memiliki kunci utama dalam mengelola dan mengembangkan Desa Wisata Sitiwinangun. Menurut Ansell dan Gash, *collaborative governance* ialah proses kerja sama yang dilakukan oleh beberapa lembaga publik dengan pihak lain yang terkait dan terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam upaya menyelesaikan masalah public¹³. Collaborative governance menjadi strategi yang tepat dalam mengembangkan desa wisata. Dengan berkolaborasi pihak-pihak yang terlibat, baik dari sektor publik maupun privat, bekerja sama dengan cara dan proses yang telah disepakati untuk menghasilkan produk yang akan digunakan oleh masyarakat secara kebijakan atau aturan¹⁴.

1.1. Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun

Ansell dan Gash mendefinisikan *collaborative governance* sebagai serangkaian aturan yang menghubungkan dan melibatkan stakeholder dengan organisasi publik melalui suatu ruang bersama sehingga mereka dapat berpartisipasi dan membuat keputusan bersama. Dalam jurnal mereka "*Collaboration Governance in Theory and Practice*", Ansell dan Gash menawarkan model *collaborative governance* yang terdiri dari empat komponen utama¹⁵.

Stakeholder yang berkolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun, antara lain: Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Pemerintah Desa Sitiwinangun, dari lembaga non-pemerintah yaitu *Grow Up Institute*, sedangkan dari pihak swasta yaitu Forum Bisnis Cirebon dan pihak akademisi dari *Institute Teknologi Bandung* dan *Universitas Dwadaya Gunung Jati*, serta pihak CSR dari PT. Telkom Indonesia.

¹³ Agus Muklis, Moh Taufik Hidayat, and Hery Nariyah, "*Collaborative Governance Pentahelix Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Di Kabupaten Cirebon*" 4, no. 1 (2022).hal-3.

¹⁴ (Maharastri n.d.) "*Proses Collaborative Governance Dalam Pelayanan Aspirasi Dan Penanganan Aduan Kanal SAPA Mbak Ita Di Kota Semarang*",n.d.2023. hal-5.

¹⁵ Agasinta, Ismah Ifaf, Ari Subowo, and R Slamet Santoso. "*Analisis Collaborative Governance Dalam Pengembangan Objek Wisata Museum Kota Lama Semarang*," n.d. *Journal Of Public Policy And Management Review*.

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/43591/30887>. Vol 13, No 2. 2024.n.d.hal 2-3.

Untuk mendukung dan mengembangkan desa wisata di Kabupaten Cirebon, salah satunya desa wisata Sitiwinangun, Bupati Cirebon mengeluarkan kebijakan baru yaitu Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon. Tujuan diharapkan desa-desa yang ada di Kabupaten Cirebon bisa mengembangkan potensi yang dimiliki setiap daerahnya. Kolaborasi dalam pengembangan Desa Sitiwinangun tidak tercipta dengan sendirinya, namun diawali dengan beberapa proses hingga menghasilkan proses kolaborasi. Untuk mengetahui bagaimana *Collaborative Governance* dalam pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun, penulis menggunakan (4) indikator yang digunakan yaitu:

A. Kondisi Awal

Kondisi awal merupakan kondisi dimana para aktor kepentingan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan fenomena seperti visi misi serta tujuan bersama yang akan dicapai. Lalu, kondisi awal juga ditandai dengan adanya sejarah kerjasama terdahulu, kerjasama ini yang akan membuktikan dan menilai apakah kerjasama saat ini berjalan baik.

1. Sejarah Kerjasama Terdahulu

Sejarah kerjasama terdahulu yang dilakukan *stakeholders* dengan pemerintah Desa Wisata Sitiwinangun sudah terjalin sebelum Desa Wisata Sitiwinangun diresmikan menjadi Desa Wisata Budaya. Inilah yang menjadi awal mula *collaborative governance* kembali dilakukan. Dengan itu para *stakeholder* memiliki komitmen bersama untuk melanjutkan kerjasama dalam pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun.

2. Visi Misi

Para *stakeholder* memiliki visi dan misi yang sama terhadap kemajuan Desa Wisata Sitiwinangun. Desa Wisata Sitiwinangun bukan hanya sekedar desa, namun desa yang memiliki nilai budaya dan sejarah yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan pariwisata di Cirebon. Nilai budaya dan sejarah yang dimiliki Desa Wisata Sitiwinangun ini diharapkan bisa menjadi sektor utama pendapatan masyarakat sehingga bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata Sitiwinangun dari produk gerabah yang dimiliki ini. Hal ini harus sejalan dengan prinsip utama Desa Wisata yaitu pembangunan desa-desa. Prinsip ini menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif sesuai dengan potensi serta asal daya lokal.

3. Ketidakseimbangan Sumber Daya

Ketidakseimbangan sumber daya pada masyarakat Desa Wisata Sitiwinangun dalam penelitian ini menjadi suatu kendala dalam *collaborative governance* yang dilakukan antara kedua belah pihak, karena sumber daya merupakan salah satu faktor terpenting dalam berlangsungnya proses *collaborative*

governance dalam pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun. *Stakeholder* menyadari potensi yang dimiliki masyarakat Desa Wisata Sitiwinangun apabila diberikan pelatihan dan pengembangan dalam meningkatkan SDM masyarakat akan mempengaruhi peningkatan kemajuan Desa Wisata Sitiwinangun. Namun peran pemerintah desa sangat penting dalam peningkatan sumber daya manusia ini sehingga ketidakseimbangan SDM dapat diminimalisir.

4. Intensif (Keuntungan)

Mengenai pengelolaan intensif (keuntungan) dari kolaborasi yang dilakukan dalam pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun bahwa setiap aktor yang berkolaborasi mendapatkan keuntungan bukan dalam bentuk finansial. Kolaborasi dibangun untuk saling menguntungkan dengan keyakinan bahwa dengan kolaborasi semua akan teratasi. Hal ini sesuai dengan pandangan ahli bahwa keuntungan dalam kolaborasi tergantung apa yang diharapkan oleh para aktor, apakah proses kolaborasi menghasilkan sesuatu yang berarti, khususnya terhadap pengorbanan waktu dan tenaga yang kolaborasi butuhkan¹⁶

5. Kekhawatiran Terjadinya Konflik

Ada rasa kekhawatiran adanya terjadi konflik untuk kedepannya hal ini secara individu masyarakat desa ada yang merasa tidak puas sehingga menimbulkan rasa egosentris dan kecemburuan di beberapa pengrajin. Kekhawatiran terjadi konflik itu ada, namun dengan komunikasi melalui dialog diskusi dan melibatkan masyarakat dan pengrajin dalam kegiatan pengembangan desa dengan pendekatan budaya sekitar akan lebih efektif sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat dan desa.

B. Kepemimpinan Fasilitatif

1. Melibatkan Peran Stakholder

Peran *stakeholder* dalam kolaborasi pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun ini sangat dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Ini yang merupakan salah satu unsur yang penting yang dapat membangun suatu *collaborative governance* ini berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan diharapkan.

Dapat diketahui *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun sudah melibatkan *stakeholders* dengan sangat baik. Seperti yang disampaikan oleh Gitsham dan Page mengatakan kepemimpinan berperan menguraikan secara luas kepada semua aktor kolaborasi mulai dari platform kolaborasi sampai pada pencapaian tujuan¹⁷.

2. Komitmen

¹⁶ Islamy, La Ode Syaiful. *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Budi Utama Keban, T. Yeremias. 2018. hal-55.

¹⁷ Islamy, La Ode Syaiful. *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Budi Utama Keban, T. Yeremias. 2018. .hal-76.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan untuk melihat indikator dari komitmen dari kepemimpinan fasilitatif dapat diketahui setiap aktor yang terlibat dari *stakeholder* memiliki komitmen yang sama dalam kolaborasi pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun ini, walaupun memang tingkat komitmen aktor ini berbeda, ada yang sangat komitmen dan *sustainable* ada yang hanya beberapa waktu tertentu saja. Terdapat komitmen dalam kepemimpinan fasilitatif dimana para aktor/pihak yang berkolaborasi sudah menunjukkan adanya respon yang baik dalam melakukan tugas masing-masing *stakeholder* yang akan berdampak untuk meningkatkan komitmen bersama.

C. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merupakan tata cara ataupun peraturan di dalam kolaborasi untuk prosedur yang transparan yang mengacu pada aturan dasar yang mengatur *collaborative governance* yang jelas dan konsisten mengaktualisasikan para pemangku kepentingan bahwa prosesnya adil dan terbuka (Murdock, dalam Ansell dan Gash, 2007).

1. Aturan Dasar

Dalam menjalankan *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun tidak ada aturan yang dijalankan dan disepakati bersama antara pemerintah, *stakeholder* dan masyarakat. Pemerintah desa maupun *stakeholder* belum merencanakan akan adanya aturan yang harus disepakati karena para aktor memfokuskan lebih dahulu bagaimana cara membangun eksistensi produk gerabah Sitiwinangun.

Kedepannya perlu dibuat aturan yang harus di sepakati secara formal antar seluruh aktor yang berkolaborasi, tidak hanya satu setor saja yang memiliki MOU dengan pemerintah, namun keseluruhan sektor aktor harus menyepakati secara bersamaan mengingat pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan baru yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Cirebon No.57 Tahun 2022 tentang pembentukan dan pengembangan Desa Wisata yang ada di kabupaten Cirebon.

2. Partisipasi

Partisipasi dalam *collaborative governance* dapat dilihat dalam kolaborasi yang dibangun antara pemerintah dengan masyarakat, maupun antara pemerintah dengan swasta dalam pengembangan pariwisata. Itulah mengapa partisipasi menjadi indikator penting dalam *collaborative governance*. Hubungan kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat adanya persamaan kedudukan diantara para aktor dalam merumuskan dan mengimplementasikan secara tepat berdasarkan masukan-masukan dari *stakeholder*.

3. Forum Diskusi

Stakeholder, pengrajin dan masyarakat memiliki pandangan yang sama bahwa memang belum ada forum yang dibentuk secara rutin dalam pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun. Untuk kedepannya pembentukan

forum secara formal ini penting dibentuk agar diskusi-diskusi yang dilakukan dapat berjalan lancar dan melibatkan semua pihak nantinya.

4. Transparan

Transparansi dalam kolaborasi pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun antara pemerintah, *stakeholder* dan masyarakat, bahwa *stakeholder* bebas memperoleh informasi tentang adat, potensi dan budaya Desa Wisata Sitiwinangun namun memang ada beberapa hambatan-hambatan terkait penyatuan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat terkait indikator sapta pesona Desa Wisata. Program yang dibuat pemerintah desa harus bisa dikomunikasikan dengan pihak *stakeholder* lalu dilanjutkan dengan diskusi dan anggaran yang dibutuhkan.

D. Proses Kolaborasi

1. *Face to face* (Dialog tatap muka)

Proses kolaborasi dialog tatap muka ataupun *face to face dialogue* pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun terus dilakukan walaupun memang tidak terjadwal, pertemuan yang dilakukan bersifat informal. Pemerintah desa selalu melakukan dialog dengan pihak *stakeholder* baik di luar desa maupun di kantor desa.

2. *Trust Building* (Membangun Kepercayaan)

Dalam proses kolaborasi masyarakat, pemerintah dan *stakeholder* juga memiliki tingkat kepercayaan yang berbeda kepada para aktor yang terlibat dilihat dari upaya-upaya yang di hasilkan. Pemerintah sebagai lembaga politik memiliki peran besar dalam pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun. Walaupun memang ada hambatan yang membuat kepercayaan yang dibangun terkadang juga membuat masyarakat menjadi ragu.

3. *Commitmen to process* (Komitmen terhadap proses)

Komitmen dari para *stakeholder* dalam melakukan kolaborasi menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan proses kolaborasi. Komitmen yang dibangun pemerintah dan *stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun hingga saat ini ialah bagaimana komitmen yang telah dibangun dan dilakukan ini bisa terus dilakukan kedepannya hingga terwujudnya Desa Wisata Sitiwinangun sebagai Desa Wisata berbasis budaya. Para aktor yang berkolaborasi telah memiliki visi misi dan tujuan yang sama dalam pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun ini agar terwujudnya Desa Wisata yang *suistanable tourism* dan eksistensi gerabah pun tetap terjaga.

4. *Share Understanding* (Pemahaman bersama)

Semua pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi sudah memiliki pemahaman yang sama untuk bersama-sama mencapai tujuan. Tetapi memang adanya ketidakseimbangan dari masyarakat yang sebagian tidak sepaham dan belum mengetahui adanya kolaborasi pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun

ini. Sebagian masyarakat menganggap keuntungan hanya diperoleh untuk pihak tertentu saja.

Dari pemerintah daerah pun sangat mendukung adanya kolaborasi pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun, namun pemerintah daerah belum bisa memberi SK resmi kepada Desa Wisata Sitiwinangun sebagai Desa Wisata karena pemerintah desa Sitiwinangun belum mengajukan persyaratan menjadi desa wisata ke Disbudpar.

5. *Intermidate Outcomes* (Hasil Sementara)

Bahwa hasil sementara yang telah dicapai dari proses kolaborasi pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun yaitu:

1. Desa Wisata Sitiwinangun sudah lebih dikenal masyarakat di Cirebon dan luar daerah.
2. Gerabah Sitiwinangun mengalami peningkatan produksi dan minat pembeli.
3. Jumlah wisatawan mengalami kenaikan pengunjung sejak diresmikannya menjadi Desa Wisata oleh Almarhum Sutan Arief Natadiningrat.
4. Desa Wisata Sitiwinangun mampu mengangkat pariwisata di Kabupaten Cirebon dan melahirkan 22 Desa Wisata di Kabupaten Cirebon.
5. Diterbitkannya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon.

Dengan banyaknya *small wins* yang telah tercapai, maka hal ini dapat terlihat bahwa hasil sementara dari proses kolaborasi pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun tersebut sudah tercapai.

1.2. Faktor Penghambat *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun

Untuk mengetahui faktor penghambat dalam proses *collaborative governance*, penulis melakukan wawancara dengan pihak desa Sitiwinangun:

“untuk hambatan/tantangan ini ekosistem yang masih melekat di masyarakat. Kami sendiripun sebagai pihak desa belum bisa mengkomunikasikannya dengan baik satu sama lain dengan masyarakat sehingga ya masih ada yang bergerak sendiri-sendiri. Namun saya yakin lambat laun akan berubah seiring berjalannya waktu”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Direktur *Grow Up Institute*:

“masyarakat Desa Sitiwinangun sangat kurang kesadarannya dalam bersama-sama dalam pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun ini. Masyarakat Desa Wisata Sitiwinangun ini mindsetnya pengen serba instan. Masyarakatnya ini sangat susah untuk disadarkan, mereka ingin Desa Wisata Sitiwinangun dikunjungi banyak wisatawan, namun masyarakatnya sendiri tidak mau untuk mengimplementasikan *sapta pesona*. Padahal secara modal mereka sudah ada”.

Dari hasil wawancara diketahui dalam kolaborasi pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun terdapat faktor penghambat yang dihadapi pemerintah, *stakeholder* dan masyarakat selain hasil yang sudah tercapai tersebut. Faktor penghambat ini muncul dari internal dan juga eksternal yang tidak bisa diselesaikan sekaligus oleh para aktor yang berkolaborasi ataupun pemerintah desa sendiri. Diperlukan komitmen, kerja keras dan kebijakan baru untuk bisa mengurangi hambatan tersebut. Dari observasi yang penulis lakukan langsung, penulis menemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun antara lain:

1. Pemahaman Masyarakat

Dalam kolaborasi pemahaman bersama menjadi faktor penting untuk mencapai keberhasilan kolaborasi. Dalam hal ini pemahaman tidak hanya harus dipahami oleh pemerintah dan *stakeholder* saja, namun masyarakatpun harus paham dengan visi misi desa serta tujuan yang hendak dicapai bersama untuk kesejahteraan masyarakat sendiri. Dalam hal ini masyarakat banyak yang masih belum paham dengan pentingnya pengembangan Desa Sitiwinangun.

2. Sumber Daya Manusia

Masih ada SDM pengrajin yang memiliki rasa egosentris, mindset yang ingin instan dan kurangnya motivasi, inovasi dalam model produk gerabah. Hal ini dikarenakan adanya miss komunikasi dalam setiap ada program atau informasi, yang membuat masyarakat ketinggalan informasi.

3. Keterbatasan Fasilitas

Hal ini menjadi alasan mengapa banyak pengrajin yang memilih untuk berpindah profesi. Ini dikarenakan fasilitas dalam membuat produk gerabah semakin kesini semakin terbatas peralatan yang dimiliki pengrajin. Bantuan dari pemerintahpun belum banyak diberikan, sedangkan bantuan fasilitas yang diberikan *stakeholder* juga terbatas.

4. Pemasaran Produk Gerabah

Pengrajin di Desa Sitiwinangun yang semakin berkurang sehingga hampir menyebabkan punahnya kerajinan gerabah di Desa Sitiwinangun ini dikarenakan pengrajin/masyarakat yang terkendala untuk memasarkan produk gerabah. Banyak pengrajin yang bingung produk gerabah ini dijual kemana selain kepada pengepul yang memberikan harga patok yang sangat murah.

5. Sosialisasi/Pembinaan

Pembinaan menjadi kegiatan penting dalam *collaborative governance* pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun ini, karena dengan adanya pembinaan/sosialisasi kepada masyarakat dan pengrajin khususnya kepada anak muda Desa Sitiwinangun untuk mawadahi dan menciptakan generasi muda kedepannya yang menggantikan pengrajin sesepuh. Pemerintah perlu

mewadahi anak muda desa untuk bisa menggali potensi yang dimiliki Desa juga agar bisa dikembangkan

Upaya yang dilakukan oleh Para Stakeholder dalam Pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun

Dari hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan langsung, penulis dapatkan peran dan upaya yang dilakukan para aktor yang terlibat kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun ini, bahwa setiap aktor memiliki perannya masing-masing dalam pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun ini. Diantara peran dan upaya yang dilakukan yaitu :

1. Peran Pemerintah Desa

Pemerintah berperan sebagai jembatan penghubung antara *stakeholder* dengan masyarakat atau pengrajin gerabah. Melalui dukungan dari Keraton Kasepuhan serta berbagai pihak *stakeholder*, menjadikan perbaikan Desa Sitiwinangun semakin jelas. Salah satu upaya pemerintah desa menyediakan tempat untuk pekerjaan gerabah yaitu menyediakan tanah dan bangunan untuk membuat galeri yang dikelola oleh perangkat desa Sitiwinangun yaitu Kadus dan Kaurkesra. Letak galeri yang bersebelahan dengan kantor pemerintah desa tentunya memiliki kelebihan tersendiri yaitu ketika ada tamu yang datang ke Desa Sitiwinangun, secara tidak langsung para tamu akan melihat adanya bengkel gerabah di Desa Sitiwinangun yang merupakan hasil kerajinan masyarakat.

2. Peran Stakeholder

Bantuan dana yang berhasil diberikan dari PT. Telkom Indonesia yang bekerja sama dengan *Grow Up Institute* sebagai fasilitator untuk dibagikan kepada para pengrajin Upaya membantu dalam menunjang modal. Semakin berkurangnya pengrajin gerabah dikarenakan faktor modal para pengrajin yang tidak cukup biaya untuk memproduksi lebih banyak produk gerabah. Tentunya untuk meningkatkan inovasi dari produk gerabah, diadakannya pelatihan desain produk gerabah untuk menambah kekayaan ragam karya gerabah Sitiwinangun tanpa meninggalkan kekhasannya. Pelatihan desain produk ini didukung oleh akademisi dari *Institute Teknologi Bandung (ITB)* serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. Untuk mendukung pengembangan Desa Sitiwinangun dan memperkuat produksi gerabah, PT. Telkom Indonesia memberikan bantuan alat pemanggang gerabah kepada beberapa pengrajin di Desa Sitiwinangun. Stakeholder dalam pengembangan desa wisata Sitiwinangun berupaya meningkatkan eksistensi produk gerabah agar lebih dikenal masyarakat dengan branding produk gerabah dengan menjadikan Desa Sitiwinangun sebagai tempat yang harus dikunjungi oleh tamu atau wisatawan yang datang ke Keraton Kasepuhan.

3. Peran Masyarakat

Desa Sitiwinangun tidak hanya memiliki potensi dari produk kerajinan gerabahnya saja, namun ada kesenian yang menjadi ciri khas Desa Sitiwinangun seperti kesenian gamelan dan tari Talawengker yang diperankan oleh pemuda pemudi desa Sitiwinangun. Para pemuda turut aktif dalam mengembangkan dan melestarikan kesenian asli Desa Sitiwinangun. Hal ini menjadi salah satu upaya masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun. Upaya yang dilakukan masyarakat desa juga ialah dengan kembali menekuni kerajinan gerabah yang semakin berkurang karena masyarakat memilih pindah alih profesi. Dengan menggiat kembali produk kerajinan gerabah, menjadi upaya masyarakat dalam menjaga dan melestarikan produk kerajinan gerabah agar tetap eksis dan lebih dikenal lagi oleh masyarakat luar.

4. Peran Pemerintah Daerah

Upaya pemerintah daerah dalam pengembangan desa wisata sitiwinangun dengan mewadahi masyarakat untuk terlibat dan aktif dalam pengembangan pariwisata Cirebon. Melalui pameran UMKM yang diadakan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon diharapkan industri pariwisata di Kabupaten Cirebon dapat meningkat. Pameran menjadi kegiatan rutin pemerintah setiap tahunnya. Selain itu Pemerintah daerah memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam mengatur wilayahnya. Sebagai wujud komitmen pemerintah daerah terhadap desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Cirebon. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sangat berpengaruh terhadap pengembangan pariwisata di Cirebon. Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan dan pengembangan desa wisata di Kabupaten Cirebon ialah dengan terbitnya peraturan baru Bupati Cirebon No.57 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon serta Pemerintah Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon sedang merencanakan Kabupaten Cirebon sebagai Cirebon yang berbudaya sedang mencanangkan Program Desa Tematik atau Desa Kreatif yang mana lokasinya ada di Kecamatan Jamblang.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dari data primer dan sekunder, bahwa kolaborasi dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Budaya di Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon telah memberikan dampak yang positif bagi perkembangan desa wisata. Namun dalam proses pengembangan dinilai masih belum optimal dikarenakan 1.) Dalam proses kerjasama (*Collaborative Governance*) dalam pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun yang melibatkan lembaga dan stakeholder hingga saat ini tidak adanya aturan dasar yang disepakati sehingga dikhawatirkan para stakeholder menjadi memiliki kepentingan masing-

masing. Kolaborasi ini juga tidak ada diskusi forum yang terstruktur sehingga stakeholder merasa pemerintah desa kurang transparan. Hingga kini masih sering terjadi kecemburuan dari antar pengrajin karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kolaborasi ini dan keterlibatan stakeholder belum sepenuhnya dirasakan masyarakat karena sering terjadi *miss* komunikasi. 2.) Dalam *collaborative governance* mengalami hambatan dalam proses kolaborasi, faktor yang menjadi penghambat pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun ini seperti kurangnya pemahaman masyarakat, pemasaran produk gerabah yang masih dibingungkan masyarakat, ketidakseimbangan Sumber Daya Manusia pada masyarakat, kurangnya pembinaan/pelatihan dari pemerintah serta fasilitas yang terbatas. Faktor Penghambat ini muncul dari intenal dan juga eksternal yang tidak bisa diselesaikan sekaligus oleh para aktor yang berkolaborasi ataupun pemerintah desa sendiri. 3.) Para aktor yang terlibat sudah melakukan perannya masing-masing yang mana peran yang dilakukan ini memberikan dampak yang sangat baik untuk pengembangan Desa Sitiwinangun. Pemerintah desa telah berperan sebagai jembatan antara stakeholder dan masyarakat, menyediakan galeri gerabah untuk memperkenalkan produk local. Stakeholder seperti Grow Up Institute, PT. Telkom dan akademisi dari ITB telah memberikan dukungan secara finansial, pelatihan dan fasilitas berupa alat pembakar gerabah untuk meningkatkan produksi dan keterampilan pengrajin. Masyarakat dan pemuda aktif melestarikan kerajinan dan kesenian local desa Sitiwinangun, sementara pemerintah daerah memfasilitasi keterlibatan masyarakat dan mendukung desa Sitiwinangun melalui pameran UMKM ataupun pameran.

Daftar Pustaka

- Agasinta, Ismah Ifaf, Ari Subowo, and R Slamet Santoso. "Analisis *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Objek Wisata Museum Kota Lama Semarang," n.d. *Journal Of Public Policy And Management Review*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/43591/30887>. Vol 13, No 2. 2024.
- Aries Kurniawan, and Moh Dian Kurniawan. "Pengembangan, Strategi, Wisata Desa, Yang Berkelanjutan Sukaris,." "Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License," n.d. <https://doi.org/10.30587/manajerial.v10i1.4751>. 2023.
- Berliandaldo, Mahardhika, Achmad Chodiq, and Driszal Fryantoni. "Kolaborasi Dan Sinergitas Antar Stakeholder Dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong." *INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia* 4, no. 2 (2021): 221–34. <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v4i2.179>. 2021.
- Dewi, Made Heny Urmila. "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali." *Jurnal Kawistara* 3, no. 2 (August 17, 2013). <https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>. 2013.

- Komariah, Neneng, Encang Saepudin, and Pawit M. Yusup. "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal Pariwisata Pesona* 3, no. 2 (December 26, 2018). <https://doi.org/10.26905/jpp.v3i2.2340>. 2018.
- (Maharastri n.d.). "Proses *Collaborative Governance* Dalam Pelayanan Aspirasi Dan Penanganan Aduan Kanal SAPA Mbak Ita Di Kota Semarang", n.d. 2023. hal-5.
- Matthoriq, Matthoriq, Soesilo Zauhar, and Romy Hermawan. "Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Pariwisata-Desa (Studi Pariwisata-Desa 'Bumiaji Agrotourism' Di Kota Wisata Batu)." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 007, no. 01 (2021): 20-29. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2021.007.01.3>.
- Muklis, Agus, Moh Taufik Hidayat, and Hery Nariyah. "Collaborative Governance *Pentahelix* Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Di Kabupaten Cirebon" 4, no. 1 (2022).
- Rahayu, Sri. "Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan," <https://www.researchgate.net/publication/370060422>. 2022.
- Rifka Agustianti, Penulis, Lissiana Nussifera, L Angelianawati, Igit Meliana, Effi Alfiani, Qomarotun Nurlaila, Nicholas Simarmata, et al. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Tohar Media*, n.d. <https://toharmedia.co.id>. 2022.
- Rizaldi, Andi Risfan, and Parea Rusan Rangan. "Desa Wisata," <https://www.researchgate.net/publication/358739614>. 2021
- (Rochmatin n.d.). "Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan Di Desa Wisata Kertosari," n.d. 2022.
- Salsabila, Maya Sajidah, Agus Machfud Fauzi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri) Affiliation 1. Universitas Negeri Surabaya, Negeri Surabaya, Jl Lidah Wetan, Lidah Wetan, Kec Lakarsantri, Kota Sby, and Jawa Timur.." *Jurnal Pariwisata Terapan*. Vol. 5, 2021. <https://jurnal.ugm.ac.id/jphttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>.
- (Shofiyatin n.d.). "Collaborative_Governance_Sebuah_Penganta," Doc Num: 007/AdmPublik-ES/Gen-X11-2022 n.d. 2021.